

PERAN KOPERASI AGRIBISNIS DALAM KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

Koperasi merupakan badan hukum yang paling sesuai untuk masyarakat pedesaan yang sebagian besarnya bergerak pada sektor pertanian dengan ciri kegotong-royongan masyarakat yang melekat. Maka berbicara ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari peran koperasi agribisnis atau Koperasi Unit Desa (KUD).

Keikutsertaan koperasi dalam Program Swasembada Pangan sudah dimulai sejak tahun 1974 dengan didirikannya Badan Usaha Unit Desa yang kemudian berubah nama menjadi Koperasi Unit Desa. Selama lebih dari 30 tahun KUD secara aktif telah dilibatkan dalam kegiatan tersebut, tidak saja dalam pengadaan gabah/beras untuk mendukung stok beras nasional, tetapi juga dilibatkan dalam penyediaan sarana produksi padi (saprodi), pengolahan hasil dan pemasarannya ke pasaran umum (pasar bebas)

Keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras pada tahun 1984 yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) adalah bukti nyata kontribusi Koperasi. Selama lebih dari 30 tahun KUD secara aktif telah dilibatkan tidak saja dalam pengadaan gabah/beras untuk mendukung stok beras nasional, tetapi juga dilibatkan dalam penyediaan sarana produksi padi (saprodi), pengolahan hasil dan pemasarannya ke pasaran umum (pasar bebas). Potensi Koperasi yang dalam hal ini KUD dalam kegiatan pengadaan gabah dan beras dalam beberapa dasawarsa yang lalu memang cukup besar, baik dilihat dari ketersediaan sarana, maupun ketersediaan personil. Demikian juga sesungguhnya KUD mempunyai keterikatan usaha yang sangat kuat dengan petani, walaupun keberhasilan KUD pada waktu itu belum lagi optimal. Maka dari itu sudah saatnya sekarang Koperasi terutama koperasi agribisnis mengambil alih dan berperan dalam meningkatkan sistem ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, minimal dalam tiga hal. Pertama, akses terhadap pangan dan gizi yang merupakan hak yang paling asasi bagi manusia. Kedua adalah pangan memiliki peranan penting

dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketiga, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan ketersediaan pangan yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat (UU No.7/1996 tentang Pangan), yang diutamakan berasal dari kemampuan sektor pertanian domestik dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat (PP No.68/2002 tentang Ketahanan Pangan). Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem, yaitu:

1. Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk,
2. Distribusi pangan yang lancar dan merata, dan
3. Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan sistem ketahanan pangan, koperasi agribisnis perlu melakukan revitalisasi peran dan fungsinya.